

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filipina negara yang mendapatkan kedaulatannya sendiri pada tanggal 4 Juli 1946 dengan bentuk pemerintahan Republik Presidensial dan kepala pemerintahan Presiden, negara ini memiliki badan legislatif nasional yaitu Kongres Filipina. Badan tersebut merupakan badan bikameral yang terdiri dari majelis tinggi yaitu Senat, dan majelis rendah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Negara ini juga sebuah negara besar yang sistem hukumnya jarang dipelajari oleh akademisi internasional, dengan Jumlah penduduk 100 juta orang lebih membuat negara Filipina menduduki kepadatan penduduk urutan ke-13 di dunia, dan negara tersebut telah menarik perhatian masyarakat internasional karena pembunuhan diluar proses hukum bersekala besar yang terjadi pada tahun 2016 dan impunitas yang dinikmati oleh para pelaku kejahatan¹. salah satunya yakni Rodrigo Duterte presiden Filipina yang ke-16.

Sebelum menjadi Presiden Filipina, Duterte pernah menjabat di kota Davao selama 22 tahun². Namun pada saat itu kritikus internasional seperti *Amnesty internasional* dan *Human Rights Watch*, mengklaim bahwa selama

¹ David T. JOHNSON & Jon FERNQUEST, "Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines", *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 5, No. 1 (2018), hlm. 2

² [Tim Ott](https://www.biography.com/political-figure/rodrigo-duterte), 2020, *Rodrigo Duterte Biography*, <https://www.biography.com/political-figure/rodrigo-duterte>, (Diakses pada tanggal 22 Desember 2020).

Duterte menjabat, ia bertanggung jawab atas lebih dari 1.000 pembunuhan di luar proses hukum, selama ia menjabat di kota Davao³.

Situasi Filipina pada tahun 2016 berawal saat Presiden Filipina memobilisasi anti narkoba nasional dan menjalankan “*War on drugs*” atau perang melawan narkoba, Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan *Command Memorandum Circular* No. 16 – 2016 tentang PNP *Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: “Double Barrel”* tertanggal 1 Juli 2016. Dalam pertengahan berjalannya operasi tersebut terdapat lonjakan pembunuhan dan kekerasan di seluruh negeri terutama di *National Capital Region* (NCR) atau di Metro Manila. Ia juga memiliki pandangan bahwa perdagangan narkoba dan masyarakat yang candu akan narkoba di Philipina, merupakan sebab akibat dari terhambatnya perekonomian dan pertumbuhan sosial di negara Philipina serta dengan fakta bahwa generasi muda memakai narkoba untuk berkerja karena sebagian besar berperilaku disinhibisi⁴. Kebijakan tersebut menyebabkan pembunuhan ribuan orang Filipina tidak dikenal yang diduga terlibat dengan narkoba dan menarik perhatian masyarakat internasional⁵. Gil Espenido berpendapat dalam karya tulisnya bahwa dalam perang melawan narkoba, hak asasi manusia telah salah dikaitkan dengan hukuman bagi para

³ Michael Ray, 2022, *Rodrigo Duterte. President of the Philippines*, <https://www.britannica.com/topic/Rodrigo-Duterte> , (Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 jam 16:22).

⁴ Salvador Santino F. Regilme, Jr, “Visions of Peace Amidst a Human Rights Crisis: War on Drugs in Colombia and the Philippines”, *Journal of Global Security Studies*, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 7.

⁵ Mong Palatino, 2017, *Duterte’s ‘War on Drugs’ in the Philippines: By the Numbers*, <https://thediplomat.com/2017/01/dutertes-war-on-drugs-in-the-philippines-by-the-numbers/> , (Diakses pada tanggal 23 Desember 2020 jam 09:15).

penjahat, serta bukan lagi penuntutan terhadap para kaum lemah, rentan, dan korban untuk melawan kapasitas negara untuk penyalahgunaan kekuasaan⁶.

Berdasarkan *United Nations World Report of Drug* pada tahun 2009 Filipina menduduki urutan kelima sebagai negara produsen shabu jenis mariyuana di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oceania⁷. Terdapat 1.7 juta pengguna obat-obatan terlarang di Philipina, dan terdapat 4.8 juta yang pernah mencoba obat-obatan terlarang setidaknya sekali selama hidup mereka, jenis narkoba yang dipakai di Filipina pada umumnya berjenis *Shabu* atau kerap disebut “*poor man*”. Di bulan November 2020, *Philippine National Police* (PNP), melaporkan ada hampir 8.000 tersangka telah tewas selama operasi *War on Drugs* sejak tahun 2016, lalu pada bulan bulan September – Oktober 2020 terdapat 2.423 tersangka narkoba telah tewas, namun menurut Badan Penegakan Narkoba (PDEA) melaporkan bahwa ada 6.011 orang yang telah meninggal karena kebijakan tersebut, terhitung sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Desember 2020⁸.

Mendengar kabar situasi di Filipina tersebut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebagai lembaga yang terbentuk dari perjanjian Statuta Roma yang berwenang untuk mengadili dan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Filipina, Dalam karya tulis

⁶ Gil Espenido, “Philippines’ War on Drugs: Its Implications to Human Rights in Social Work Practice”, *Springer Link*, Vol. 3, No. 3 (2018), hlm. 141.

⁷ World Drugs Report, 2015, *United Nations Office on Drugs and Crime : Philippines Country Report*, https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf , (Diakses pada tanggal 23 Desember 2020 jam 20:02).

⁸ Philippine Drug Enforcement Agency online, 2021, #*REALNUMBERSPH*, https://pdea.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=279 , (Diakses pada tanggal 25 September 2021 jam 13:10).

ilmiah Hendrik B. Sompotan menjelaskan bahwa dalam Statuta Roma disebutkan mengenai persyaratan suatu kejahatan termasuk dalam yurisdiksi ICC yakni :

1. Asas *ratione materiae* (Materi);
2. Asas *ratione temporis* (Waktu);
3. Terpenuhinya salah satu dari asas *ratione loci* atau asas *ratione personae*⁹.

Untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut harus adanya bukti yang kuat agar dapat bisa diproses lebih lanjut, pengaduan pertama berasal dari pengaduan yang diajukan oleh seorang pengacara Filipina yang mewakili dua pria yang mengatakan mereka adalah pembunuh bagi Duterte di Davao, kota selatan tempat Duterte menjadi walikota pada akhir 1980-an. Dan Pengaduan kedua diajukan pada bulan Agustus oleh kerabat delapan orang yang dibunuh oleh petugas polisi dalam perang narkoba; mereka juga menuduh Duterte melakukan pembunuhan dalam kebijakan *War on Drugs* yang sangat bertentangan dan melanggar dengan apa yang disetujui negara Filipina dalam Perjanjian Statuta Roma¹⁰. Kebijakan Duterte juga ditentang oleh masyarakat Filipina sendiri, dilihat berdasarkan survey yang dilakukan *Social Weather Stations* (SWS) bahwa 51% masyarakat Filipina tidak setuju dengan kebijakan Duterte yang secara brutal langsung membunuh pengguna

⁹ Hendrik B. Sompotan, “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 77-78.

¹⁰ Jason Guitierrez, 2019, *Philippines Officially Leaves the International Criminal Court*, <https://www.nytimes.com/2019/03/17/world/asia/philippines-international-criminal-court.html>, (Diakses pada tanggal 6 Oktober 2021 jam 7:40).

narkoba tanpa proses peradilan dikarenakan pengguna narkoba tidak dapat lagi berubah¹¹.

Pada tanggal 8 February 2018, ICC mengumumkan pemeriksaan pendahuluan terhadap kampanye war on drugs yang dikeluarkan oleh pemerintah Philippina sejak 1 July 2016 lalu. Investigasi berpusat pada ribuan pemakai narkoba yang terbunuh dalam peperangan antar kelompok dan juga yang terbunuh dalam operasi anti narkoba oleh aparat di luar proses hukum¹².

Merespon dari tindakan ICC tersebut, Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada tanggal 19 Maret 2018 akan mengundurkan diri dari ICC, apabila investigasi terhadap kebijakan war on drugs dilanjutkan maka Filipina akan mengundurkan diri dari Statuta Roma¹³. Menanggapi dari pengumuman pemeriksaan pendahuluan dalam ancamannya terhadap ICC, hal tersebut dalam faktanya tidak akan mengubah legitimasi penyelidikan ICC¹⁴. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) berpendapat bahwa ancaman Duterte terhadap pejabat ICC sama dengan “menghalangi, mengintimidasi, atau secara korup mempengaruhi pejabat Pengadilan dengan

¹¹ Jayeel Cornelio & Erron Medina, “Christianity and Duterte’s War on Drugs in the Philippines”, *Taylor Francis Online*, Vol. 20, No. 2 (2019), hlm. 2.

¹² ICC, 2018, *Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on opening Preliminary Examinations into the situations in the Philippines and in Venezuela*, <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180208-otp-stat>, (Diakses pada tanggal 24 september 2021 jam 20:12).

¹³ Ted Regencia, 2018, *Duterte announces Philippines’ ‘immediate’ withdrawal from ICC*, <https://www.aljazeera.com/news/2018/3/14/duterte-announces-philippines-immediate-withdrawal-from-icc>, (Diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 jam 09:33).

¹⁴ Adrian Gallagher, Euan Raffle & Zain Maulana, “Failing to fulfil the responsibility to protect: the war on drugs as crimes against humanity in the Philippines”, *The Pacific Review*, Vol.33, No. 2 (2019), hlm.2.

tujuan memaksa atau membujuk pejabat tersebut untuk tidak melakukan, atau melakukan secara tidak pantas, tugasnya,” dan dengan demikian melanggar ketentuan dalam Pasal 70 Statuta Roma. Berdasarkan pasal 165 tentang Aturan Acara dan Pembuktian, dan dalam periode *reglementary* yang ditentukan dalam pasal 164, penuntut ICC harus segera memulai penyelidikan sehubungan dengan pelanggaran tersebut terhadap administrasi keadilan¹⁵. Mengetahui besarnya korban yang tampak dari peluncuran kampanye antinarkoba ditetapkan oleh pemerintahan Duterte, dalam karya tulis Jenna Mae L. Atuna, Ronald U. Mendozaa, Clarissa C. Davida, Radxeanel Peviluar N. Cossida, dan Cheryll Ruth R. Sorianoc, menyebutkan bahwa angka kematian pada saat pelaksanaan Wod Filipina sangat mungkin bahwa akan lebih banyak angka pembunuhan yang tidak dilaporkan oleh media, kelompok hukum, dan pemerintah Filipina sendiri¹⁶.

Setelah 1 tahun berlalu pada tanggal 17 Maret 2019 Filipina dinyatakan secara resmi mengundurkan diri dari ICC, dikarenakan negara Filipina sendiri menyatakan akan keluar dari ICC apabila penyelidikan lebih lanjut oleh ICC, pada bulan Februari tahun 2018 tentang kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam *War on Drugs* di negara Filipina dilanjutkan, pemerintah Filipina beranggapan bahwa program perang terhadap narkoba ini

¹⁵ GMA News, 2021, *Rights group submits more evidence in ICC case vs Duterte, drug war*, <https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/775844/rights-group-submits-more-evidence-in-icc-case-vs-duterte-drug-war/story/>, (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021 jam 19:22).

¹⁶ Jenna Mae L. Atuna, Ronald U. Mendozaa, Clarissa C. Davida, Radxeanel Peviluar N. Cossida, dan Cheryll Ruth R. Sorianoc, “The Philippines’ antidrug campaign: Spatial and temporal patterns of killings linked to drugs”, *International Journal of Drug Policy*, Vol. 73, No. 15 (2019), hlm 110.

adalah inisiatif kebijakan khasnya dari Presiden Rodrigo Duterte, dan akan tetap dipertahankan, terutama dari para kritikus-kritikus internasional¹⁷.

Jaksa penuntut ICC Fatou Bensouda mengatakan dalam laoprannya, dan mempercayai bahwa *War on Drugs* dalam kebijakan pemerintah Filipina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan pasal 7 ayat 1 (a), penyiksaan pasal 7 ayat 1 (f), dan penjatuhan cedera fisik yang serius dan kerusakan mental karena tindakan tidak manusiawi lainnya pasal 7 ayat 1(k) Dalam pasal 124 Statuta Roma tentang Ketentuan Peralihan. Artinya negara Filipina menjadi pihak yang dan menerima yuridiksi ICC pada 30 Agustus tahun 2011 dan meratifikasinya¹⁸.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menegaskan bahwa Negara Filipina setelah mengundurkan diri dari Statuta Roma, negara tersebut menjadi negara non-partai Statuta Roma, Artinya negara Filipina sudah dilepaskan dari semua keharusya dan kewajibannya sebagai anggota dari Statuta Roma¹⁹. akan tetapi tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Filipina masuk dalam yurisdiksi Mahkamah pidana Internasional yang sebagai mana tercantum dalam Statuta Roma 1998. Sehingga peneliti tertarik unuk membahas mengenai **Yurisdiksi International Criminal Court Dalam**

¹⁷ AL JAZEERA, 2019, *NEWS AGENCIES : Philippines officially out of the International Criminal Court*, <https://www.aljazeera.com/news/2019/3/17/philippines-officially-out-of-the-international-criminal-court> , (Diakses pada tanggal 25 Desember 2020 jam 18:11).

¹⁸ Dahlia Simangan, "Is the Philippine "War on Drugs" an Act of Genocide?", *Journal of Genocide Research*, Vol. 20, No. 1 (2017), hlm. 7.

¹⁹ Sandi Kurnia Christmas, "Impact of Withdrawal State Parties in 1998 Rome Statute of the Existence of International Criminal Court", *Nagari Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 3.

Penyelesaian Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Kebijakan War on Drugs Presiden Filipina).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ICC masih mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa, mengadili atau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dalam war on drugs di Filipina ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibuat oleh penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dari kewenangan proprio motu
2. Untuk memahami batasan-batasan yuridiksi ICC dalam menjalankan tugasnya.
3. Untuk mengetahui peran ICC dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Filipina berdasarkan Statuta Roma.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan diharapkan oleh penulis adalah:

1. Dapat memberikan penjelasan secara lengkap dan menjadi acuan akademisi untuk mengetahui proses dan kewenangan ICC dalam menindaklanjuti pelanggaran HAM.
2. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat internasional tentang Hak Asasi Manusia dan kekuatan hukum nya di internasional.

3. Memberikan informasi kepada beberapa lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat baik itu lokal maupun internasional yang menjung-jung tinggi HAM internasional.
4. Menjadikan tulisan sebagai bahan masukan bagi lembaga, organisasi, ataupun pemerintahan suatu negara, terkait untuk mencegah dan menjunjung tinggi HAM internasional yang telah disepakati internasional.